

KOMUNIKASI PARTISIPATIF DALAM UPAYA PENGELOLAAN HUTAN ADAT PADA KOMUNITAS ADAT DAYAK BENUAQ MUARA TAE, KABUPATEN KUTAI BARAT

William Maliki¹, Erwiantono², Ainun Ni'matu Rohmah³

Abstrak

Hutan berperan menopang kehidupan dan merupakan salah satu aset penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan, memahami, dan menganalisis proses dan penerapan komunikasi partisipatif oleh Komunitas Adat Dayak Benuaq Muara Tae dalam upaya pengelolaan hutan adat. Fokus penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan dianalisis pada penerapan empat indikator komunikasi partisipatif: heteroglasia, dialogis, poliponi, dan karnaval. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan Komunitas Adat Dayak Benuaq Muara Tae telah menerapkan empat indikator komunikasi partisipatif dalam upaya pengelolaan hutan adat. Indikator heteroglasia memperlihatkan dalam sistem pembangunan dihimpun keberagaman masyarakat yang bersinergi mencapai tujuannya. Namun, partisipasi pemerintah kampung, perempuan, dan pemuda masih minim. Indikator dialogis menunjukkan proses dialog sudah berjalan cukup baik, upaya yang dilakukan komunitas adat seperti dialog langsung, edukasi dan klarifikasi kepada masyarakat, hingga merangkul pihak yang berseberangan. Dalam indikator poliponi terlihat adanya hambatan proses komunikasi, kesenjangan dengan pemerintah kampung membuat komunikasi kedua pihak tidak pernah berjalan baik. Kemudian indikator karnaval, komunitas adat berupaya menciptakan suasana diskusi yang nyaman dan santai, memposisikan diri sebagai pendengar, serta menggunakan media sebagai alat untuk penyebaran informasi dan kegiatan komunitas adat.

Kata Kunci: *Komunikasi Partisipatif, Hutan Adat, Komunitas Adat, Muara Tae*

¹ Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Email: maliki.william99@gmail.com

² Dosen Pembimbing I dan Staf Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

³ Dosen Pembimbing II dan Staf Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hutan adat merupakan kawasan hutan yang ada di wilayah masyarakat hukum adat. Hutan berperan menopang kehidupan sehari-hari, titipan bagi generasi yang akan datang, dan merupakan aset penting masyarakat untuk menjamin kesejahteraan. Komunitas Adat Dayak Benuaq Muara Tae merupakan kelompok masyarakat adat yang bermukim di Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat. Hutan merupakan tempat cadangan makanan, apotek alam, sumber kebutuhan kegiatan upacara adat, tempat roh-roh pelindung bersemayam, sehingga merusak hutan dipercaya bisa merusak hubungan dengan roh pelindung.

Keberadaan hutan mulai terancam saat berbagai perusahaan muncul. Sejak 1971 beberapa perusahaan masuk ke wilayah Muara Tae, mulai dari HPH, HTI, tambang batu bara, perusahaan kayu, hingga kelapa sawit. Hal ini menimbulkan keprihatinan seorang tokoh adat Muara Tae, Petrus Asuy yang tergerak untuk membentuk kelompok *Sempekat Pesuli Lati Tana Adat Takaq* pada 1993 sebagai pemersatu gerakan masyarakat menjaga dan memelihara wilayah adat. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti pemetaan wilayah adat, mengidentifikasi keanekaragaman hayati, merehabilitasi wilayah yang rusak, hingga melakukan patroli penjagaan hutan. Partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam upaya mempertahankan wilayah adat dan pengelolaan hutan adat. Sehingga pendekatan komunikasi partisipatif merupakan salah satu langkah yang diterapkan komunitas adat. Seluruh elemen dilibatkan tanpa terkecuali untuk berkontribusi merumuskan, mengambil keputusan, dan evaluasi program (Rahim, 2004).

Rumusan Masalah

Bagaimana proses komunikasi partisipatif dalam upaya pengelolaan hutan adat pada Komunitas Adat Dayak Benuaq Muara Tae, Kabupaten Kutai Barat?

Tujuan Penelitian

Mendesripsikan, memahami, serta menganalisis proses dan penerapan komunikasi partisipatif dalam upaya pengelolaan hutan adat pada Komunitas Adat Dayak Benuaq Muara Tae, Kabupaten Kutai Barat.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis, diharapkan memberikan sumbangsih kajian Ilmu Komunikasi yang berkaitan dengan penerapan komunikasi partisipatif pada pengelolaan hutan adat sebagai referensi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pada Komunitas Adat Dayak Benuaq Muara Tae dalam mengimplementasikan komunikasi partisipatif pada program yang dijalankan. Serta bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan yang mendukung pengelolaan hutan adat.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian Satriani dkk. (2011) mengangkat partisipasi yang terjadi pada kader dalam kegiatan Posdaya. Hasilnya, komunikasi partisipatif yang terdiri dari empat indikator: *heteroglasia*, *poliponi*, *dialogis*, dan *karnaval* terjadi pada kegiatan Posdaya Kenanga. Kemudian, Lestari dkk. (2014), meneliti tentang tingkat partisipasi masyarakat adat dalam konservasi sumber daya hutan di Aceh Besar. Tingkat partisipasi masyarakat adat sangat berpengaruh dalam konservasi dan pengelolaan hutan/lahan. Sementara, Tanjung (2016) meneliti komunikasi partisipatif dalam pengelolaan hutan Nagari, di Sumatera Barat. Menyebutkan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat, mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa berbagai program pembangunan tidak lepas dari peran komunikasi partisipatif. Nyatanya tidak seluruh program tersebut bisa mencapai keberhasilan, terutama karena kurangnya keterlibatan masyarakat. Hal tersebut yang mendorong peneliti untuk turut mengkaji penerapan proses komunikasi partisipatif dari sudut pandang komunitas adat Muara Tae sebagai objek dalam mengelola hutan adatnya menggunakan indikator komunikasi partisipatif yang dirumuskan Servaes, yakni *heteroglasia*, *dialogis*, *poliponi*, dan *karnaval*.

Teori dan Konsep

Teori Partisipasi

Uphoff dkk. (1979) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, penikmat hasil, dan evaluasi. Sementara itu Arnstein (*dalam* Ferdiani, 2016) menyebutkan partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat, yaitu didasarkan pada distribusi kekuasaan antara masyarakat atau pemerintah. Arnstein membagi tingkatan partisipasi ke dalam beberapa poin yang disusun dalam tiga kelompok besar, yaitu: *non participation*, *degrees of tokenism*, dan *degrees of citizen power*.

Komunikasi Lingkungan

Cox (*dalam* Yenrizal, 2017) mengartikan komunikasi lingkungan sebagai sarana pragmatis dan konstruktif dalam memberikan pemahaman lingkungan kepada masyarakat. Pemikiran Cox mengenai komunikasi lingkungan sebagai sarana pragmatis dan konstitutif terbagi dalam tiga prinsip inti, yaitu: (1) komunikasi manusia merupakan bentuk simbolik; (2) segala bentuk kepercayaan, sikap, dan perilaku yang berkaitan dengan masalah alam dan lingkungan dimediasi melalui komunikasi; dan (3) adanya ruang publik sebagai ruang wacana diskusi lingkungan. Menurut Cox, ruang publik merupakan ranah yang diciptakan saat individu melibatkan orang lain dalam komunikasi, baik melalui percakapan, argumen, debat atau tanya jawab terkait subjek perhatian bersama dan topik yang memengaruhi komunitas yang lebih luas (Yenrizal, 2017).

Komunikasi Partisipatif

Komunikasi partisipatif pertama kali diperkenalkan oleh Paulo Friere, seorang intelektual Amerika dalam sebuah seminar di Amerika Latin pada 1978. Freire mencetuskan konsep komunikasi partisipatif yakni setiap individu memiliki hak yang sama dalam menyuarakan aspirasinya, baik dalam kelompok atau secara individu (Mughtar, 2016). Pola komunikasi partisipatif pada akhirnya sampai pada proses pembangunan yang melibatkan seluruh elemen tanpa terkecuali. Tak hanya sebatas merumuskan, namun juga bisa mengevaluasi kinerja dan pengambilan keputusan (Rahim, 2004).

Servaes (*dalam* Rahim, 2004) menggolongkan empat indikator komunikasi partisipatif yang mendorong terciptanya pemberdayaan (*empowerment*), yaitu: (1) *heteroglasia*, menunjukkan fakta sistem pembangunan selalu dilandasi kelompok dan komunitas yang berbeda dengan variasi ekonomi, sosial, dan faktor budaya yang saling mengisi; (2) *dialogis*, komunikasi transaksional, pengirim (*sender*) dan penerima (*receiver*) pesan saling berinteraksi dalam satu periode tertentu hingga sampai pada makna saling berbagi; (3) *poliponi*, bentuk tertinggi dari suatu dialog, suara-suara yang tidak menyatu menjadi terbuka dan tidak menutup satu sama lain; dan (4) *karnaval*, dalam komunikasi pembangunan membawa semua varian dari semua ritual seperti legenda, komik, festival, permainan, parodi, dan hiburan secara bersama-sama.

Kearifan Lokal

Masyarakat melakukan interaksi dengan lingkungannya membentuk hubungan timbal balik saling memengaruhi antara sistem sosial dan ekosistem. Dampak interaksi manusia dan alam tersebut menghasilkan kearifan lokal (Rambo; Dharmawan, *dalam* Iswandono, 2016). Kearifan lokal merupakan hal penting bagi masyarakat dalam beradaptasi dengan alam dan menjadi suatu warisan budaya untuk memanfaatkan dan mengelolah sumber daya alam dengan pengetahuan atau ide, norma adat, dan nilai budaya yang terkandung dalam konsep berpikir masyarakat (Nurdin & Ng, 2013).

Masyarakat tradisional di Indonesia dengan kearifan lokalnya mampu melakukan pemanfaatan hutan dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Contoh kearifan lokal masyarakat Baduy di Banten Selatan (Senoaji, 2011), yaitu perilaku hidup sehari-hari memegang teguh aturan adat dalam mengelola hutan dan lahan yang mencerminkan keberkelanjutan.

Pengelolaan Hutan Berbasis Kelembagaan Adat

Masyarakat adat mewarisi pengetahuan dalam pemeliharaan dan penggunaan sumber daya hutan. Melibatkan masyarakat adat penting untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, karena: (1) masyarakat lokal bergantung terhadap sumber daya dan bertanggung jawab mengelola hutan; (2) memiliki kearifan masing-masing, yakni memenuhi kondisi biofisik hutan; (3)

punya karakteristik lingkungan yang sangat beragam (biofisik, sosial, ekonomi) dan harus direspons secara cepat dan tepat (Oktoyoki dkk., 2016).

Kelembagaan adalah kumpulan kesempatan bagi individu untuk mengambil keputusan dan melaksanakan kegiatan. Schmid (*dalam* El, 2009) membagi kelembagaan dalam tiga hal utama, yakni: (1) hak-hak kepemilikan (*property right*), berupa hak dan kewajiban yang mengatur hubungan masyarakat dalam kepentingannya terhadap sumber daya; (2) batas yuridiksi (*jurisdictional boundary*), wilayah kekuasaan atau batas otoritas yang dimiliki oleh sebuah lembaga; dan (3) aturan representasi (*rules of representation*), perangkat aturan yang mengatur mekanisme pengambilan keputusan.

Definisi Konsepsional

Komunikasi Partisipatif dalam Upaya Pengelolaan Hutan Adat pada Komunitas Adat Dayak Benuaq Muara Tae, Kabupaten Kutai Barat dapat diartikan sebagai upaya Komunitas Adat Dayak Benuaq Muara Tae dalam mengelola hutan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun melalui serangkaian proses komunikasi yang melibatkan masyarakat adat, berdasarkan empat indikator komunikasi partisipatif oleh Servaes, yakni: *heteroglasia*, *dialogis*, *poliponi*, dan *karnaval*.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan studi kasus intrinsik (*intrinsic case study*). Jenis studi kasus intrinsik ditempuh untuk memahami sebuah kasus tertentu dan dipakai agar memenuhi minat pribadi karena ketertarikannya pada suatu persoalan tertentu.

Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini menggambarkan profil masyarakat Muara Tae dan mengidentifikasi indikator komunikasi partisipatif dalam pengelolaan hutan adat berdasarkan pendekatan komunikasi partisipatif oleh Servaes (*dalam* Rahim, 2004), yaitu: *heteroglasia*, *dialogis*, *poliponi*, dan *karnaval*.

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer, diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan wawancara secara langsung dipandu pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian. *Key informan* penelitian ini adalah Petrus Asuy, Ketua Komunitas Adat Dayak Benuaq Muara Tae dan informan penelitian ini sebagai berikut:
 - a. UPTD KPHP Damai, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur: Beredi, Analis Perlindungan Sumber Daya; dan Yoel, Penyulu Kehutanan Ahli Muda.
 - b. Didi, Bendahara Kampung Muara Tae.
 - c. Bapak Mimpin, Kepala Adat Kampung Muara Tae.

- d. Anggota Komunitas Adat Dayak Benuaq Muara Tae: Etun, Masrani, Amiruddin, dan Burhan.
 - e. Masyarakat Adat Kampung Muara Tae: Borsianus Boton, Rosina Rawen, Anisa, Rina, dan Zulkifli.
2. Data sekunder, didapatkan dari sumber kedua. Ketika data primer terbatas atau sulit diperoleh, data sekunder sangat membantu untuk penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dari Miles dan Huberman (*dalam* Sugiyono, 2017) meliputi tiga komponen, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

HASIL PENELITIAN

Pembahasan

Komunikasi Partisipatif

Indikator Komunikasi Partisipatif: *Heteroglasia*

Menunjukkan konsep dalam sistem pembangunan akan selalu dilandasi oleh berbagai kelompok, komunitas, atau individu yang berbeda-beda dengan berbagai variasi ekonomi, sosial, dan faktor budaya yang saling mengisi (Servaes *dalam* Rahim, 2004). Sebuah sistem pembangunan tidak akan terlepas dari individu dan kelompok yang berbeda latar belakang, status sosial, hingga kepentingan yang akan saling bersinergi menjalankan proses pembangunan.

Pada indikator *heteroglasia* keberagaman anggota komunitas adat cukup terlihat dari usia dan pendidikan, meski mayoritas yang terlibat adalah orang tua dengan tingkat pendidikan sebagian besar tidak bersekolah atau tamat SD, hanya sebagian kecil yang bisa mengenyam pendidikan. Keragaman kurang bervariasi pada pekerjaan karena seluruh anggota yang terlibat bekerja sebagai petani ladang. Minimnya keterlibatan masyarakat adat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti diawali keterbatasan pemahaman tentang konsep hak kepemilikan, tidak adanya keuntungan finansial yang didapatkan, adanya trauma masa lalu, hingga mulai lunturnya nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.

Sementara untuk kesetaraan gender juga masih minim, meski tidak ada diskriminasi gender. Anggota komunitas masih didominasi laki-laki terutama untuk kegiatan pengelolaan hutan dan patroli lapangan. Peran perempuan biasanya terlihat saat kegiatan gotong royong, misalnya menyediakan hidangan. Perempuan dan anak-anak tidak dilibatkan dalam kegiatan yang berat. Namun, komunitas adat selalu terbuka bagi siapapun yang ingin terlibat dan bergabung.

Indikator Komunikasi Partisipatif: *Dialogis*

Dialogis merupakan interaksi yang terjadi antara pendengar dan pembicara secara keseluruhan. Maksudnya adalah mengenal dan menghormati pembicara atau suara lain sebagai subjek, bukan hanya sebagai objek komunikasi Servaes (*dalam* Rahim, 2004). Upaya-upaya komunikasi (*dialogis*) telah dilakukan komunitas adat, seperti dialog langsung dalam kegiatan gotong royong, membangun partisipasi dalam diskusi dan rapat, memberikan pemahaman melalui edukasi dan klarifikasi langsung isu-isu negatif yang berkembang, serta berupaya merangkul pihak-pihak yang berseberangan. Ketua komunitas adat terbuka dan menghormati suara-suara, saran, dan masukan dari pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan adat. Tidak ada batasan untuk berbicara karena semua punya hak yang sama.

Sinergi lembaga adat dan komunitas adat sudah berjalan dengan baik. Meski masih diperlukan strategi khusus dalam mengemas pesan agar lebih mudah menjangkau masyarakat, untuk memaksimalkan peran lembaga adat dan komunitas adat. Komunikasi yang terjalin antara komunitas adat dengan pemerintah kampung dan pemerintah kabupaten belum berjalan dengan baik, bahkan cenderung terputus. Adanya perbedaan pemahaman dan kepentingan membuat upaya komunikasi cukup sulit dilakukan, karena sejak awal pemerintah kampung dan komunitas adat sudah tidak sejalan. Sehingga diperlukan upaya dari semua pihak untuk saling bersinergi agar program pembangunan bisa berjalan optimal.

Indikator Komunikasi Partisipatif: *Poliponi*

Servaes (*dalam* Rahim, 2004) menyebutkan jika *poliponi* adalah bentuk tertinggi dari dialogis. Suara-suara yang berbeda akan saling memperjelas dan tidak saling menutupi. *Poliponi* merupakan bentuk ideal dari komunikasi partisipatif, keberbedaan atau keberagaman suara disadari secara kolektif sehingga saling menguatkan.

Terdapat kesenjangan dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Koordinasi yang belum pernah terjalin dengan UPTD KPMP Damai membuat upaya sosialisasi belum terlaksana, namun akan diupayakan koordinasi dengan masyarakat adat Muara Tae. Hubungan yang tidak harmonis dengan pemerintah kampung disebabkan perbedaan pandangan dan kepentingan, sehingga upaya komunikasi tidak pernah berjalan, akhirnya memperburuk hubungan.

Minimnya informasi yang dimiliki masyarakat tentang komunitas adat akhirnya menimbulkan perbedaan persepsi dan pemahaman. Seperti merasa kurang dilibatkan dalam pengelolaan hingga penguasaan hutan adat secara sepihak. Hal ini menjadi indikasi pesan pembangunan yang dibawa komunitas adat tidak tersampaikan secara menyeluruh dan menjangkau masyarakat karena minimnya interaksi yang terjadi.

Upaya sistematis telah dilakukan komunitas untuk menyampaikan program pengelolaan hutan hingga klarifikasi informasi yang benar secara langsung kepada masyarakat. Adapun kegiatan tersebut dilakukan dalam forum rapat dan diskusi langsung dengan masyarakat. Namun, sikap masyarakat yang sudah

terlanjur pasif dan tidak ada inisiatif mencari informasi membuat upaya dialog yang dilakukan akhirnya terhambat.

Dana menjadi salah satu kendala komunitas adat dalam menjalankan program dan membangun partisipasi masyarakat. Fokus komunitas adat saat ini mengamankan wilayah adat dan pengajuan pengakuan, akan ada upaya untuk mandiri secara finansial. Karena timbulnya kesalahpahaman dana penghargaan *Equator Prize*, sehingga perlu terbuka kepada masyarakat.

Indikator Komunikasi Partisipatif: *Karnaval*

Indikator *karnaval* menitikberatkan kegiatan yang dilakukan secara tidak formal dan diselingi humor. Setiap anggota komunitas didorong untuk dapat berpartisipasi dalam karnaval secara bebas, di luar label serius dan otoritatif (Servaes *dalam* Rahim, 2004). Bahasa dan gaya indikator karnaval didasarkan pada pengalaman khalayak dan tidak diatur oleh penggunaan kosa kata umum dan berasal dari pengalaman mereka.

Dalam setiap kegiatan sosialisasi, diskusi, maupun obrolan ringan dengan masyarakat, ketua komunitas adat selalu berupaya menciptakan suasana yang nyaman. Gaya komunikasi yang digunakan oleh ketua komunitas adat lebih banyak diam dan mendengarkan. Dia memberikan kesempatan bagi anggota dan masyarakat untuk bersuara dan menyampaikan pendapat, agar lebih mudah memahami dan meraih perhatian mereka. Selain itu, ketua komunitas adat juga tidak pernah menekan dan marah dalam setiap kegiatan obrolan yang dilakukan agar masyarakat bisa berpartisipasi secara bebas.

Kehadiran kopi, rokok, dan selipan humor merupakan pelengkap dalam kegiatan kumpul-kumpul yang dilakukan oleh komunitas adat. Suasana menjadi lebih luwes dan hangat. Peran media sangat membantu komunitas adat dalam menyebarkan informasi kepada khalayak yang lebih luas. Komunitas adat sukses mendapatkan dukungan dari berbagai LSM dan publikasi dari berbagai media nasional dan luar negeri, dan mendapat penghargaan *Equator Prize* dari PBB.

Pengelolaan Hutan Berbasis Kelembagaan Adat

Hak Kepemilikan (*Property Rights*)

Schmid (*dalam* El, 2009) menyebutkan hak-hak kepemilikan (*property rights*) mengandung pengertian tentang hak dan kewajiban yang didefinisikan dan diatur oleh hukum adat, tradisi atau konsensus yang mengatur hubungan anggota masyarakat terkait kepentingannya terhadap sumber daya. Hak-hak kepemilikan masyarakat adat Muara Tae terhadap sumber daya hutan terbagi dua, yakni hak kepemilikan bersama dan hak kepemilikan pribadi.

Adapun yang masuk dalam hak kepemilikan bersama salah satunya hutan adat Utak Melinau. Masyarakat memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan hasil hutan adat seperti mencari buah-buahan, obat-obatan, bibit kayu, hingga keperluan upacara adat. Masyarakat dilarang merusak, menebang pohon, membakar, serta berladang di dalam kawasan hutan adat Utak Melinau.

Hak kepemilikan pribadi masyarakat adat Muara Tae merupakan hak kelola secara individu diwariskan secara turun-temurun. Hak tersebut diperoleh melalui pembukaan lahan yang dilakukan masing-masing keluarga pada hutan utuh, hak tersebut diakui secara adat dan akan tetap menjadi hak individu yang mengelola.

Batas Yuridiksi (*Jurisdictional Boundary*)

Menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam suatu masyarakat. Dapat berarti bahwa batas wilayah kekuasaan atau otoritas yang dimiliki oleh suatu lembaga yang berperan mengatur alokasi sumber daya (Schmid *dalam* El, 2009).

Sesuai tradisi dari leluhur, daerah yang didiami masyarakat Muara Tae dikenal sebagai wilayah adat Dayak Benuaq Ohokng Sangokng. Secara turun-temurun batas wilayah adat Muara Tae ditandai dengan batas-batas alam seperti sungai, gunung, dan jurang yang didasarkan pada latar belakang penguasaan dan kepemilikan yang diatur sejak dahulu secara adat.

Masyarakat masih diperbolehkan mencari hasil hutan dan kebutuhan hidup secara bebas di wilayah kelola masyarakat lainnya. Seperti mencari sayur-sayuran, kayu bakar, buah-buahan, hingga berburu. Termasuk membuka lahan baru di daerah hutan utuh yang belum pernah diladangi sama sekali.

Aturan Representasi (*Rules of Representations*)

Schmid (*dalam* El, 2009) memaparkan aturan representasi adalah analisis terhadap perangkat aturan yang menentukan mekanisme pengambilan keputusan dalam kelembagaan yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam. Secara umum ada dua bentuk pengambilan keputusan, yakni yang melibatkan seluruh masyarakat adat Muara Tae dan hanya dilakukan oleh lembaga adat Muara Tae.

Pengambilan keputusan yang melibatkan musyawarah dengan seluruh masyarakat adat Muara Tae, pemerintah kampung, dan lembaga adat adalah terkait pengelolaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan di wilayah adat Muara Tae. Sedangkan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga adat berkaitan dengan pengelolaan masyarakat di lahan yang menjadi hak warisnya. Lembaga adat juga berwenang memutuskan berbagai macam pelanggaran atau sengketa terkait hak kelola masyarakat terhadap sumber daya hutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Indikator *heteroglasia* belum cukup mengakomodir berbagai kepentingan, salah satunya peran pemerintah kampung. Keberagaman mulai tampak pada usia dan pendidikan, namun tidak pada pekerjaan karena masyarakat yang terlibat bekerja sebagai petani ladang. Walau tidak ada diskriminasi gender, keterlibatan perempuan masih minim, karena masih didominasi oleh laki-laki khususnya dalam patroli dan pengelolaan hutan adat.

2. Indikator *dialogis* menunjukkan proses dialog telah berjalan cukup baik. Komunitas adat melakukan upaya komunikasi kepada masyarakat melalui dialog langsung, kegiatan diskusi dan rapat, memberikan edukasi dan klarifikasi, serta merangkul pihak yang berseberangan. Sementara upaya komunikasi dengan pemerintah kampung belum berjalan karena adanya perbedaan pemahaman dan kepentingan.
3. Indikator *poliponi* memperlihatkan adanya hambatan dalam proses komunikasi akibat rendahnya partisipasi dalam dialog. Kesenjangan dengan pemerintah kampung membuat proses komunikasi tidak dapat berjalan dengan baik. Pemahaman dan persepsi berbeda di tengah masyarakat menjadi indikasi pesan belum tersampaikan menyeluruh. Komunitas adat tetap terbuka bagi pihak-pihak yang ingin mencari informasi dan berdiskusi.
4. Indikator *karnaval* menunjukkan penerapan komunikasi dalam forum sosialisasi, diskusi atau rapat sudah berjalan dengan baik, tercipta suasana yang ringan dan santai. Ketua komunitas adat selalu memosisikan diri sebagai pendengar dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bersuara. Kehadiran kopi, rokok, dan selipan humor menjadi pelengkap dalam forum dialog. Serta peran media cukup memberikan kontribusi dalam penyebaran informasi gerakan dan kegiatan komunitas adat.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pendekatan Indikator *Heteroglasia*
 - a. Hendaknya ketua komunitas melakukan pendekatan yang intens dan menjalin komunikasi secara personal kepada pemuda dan figur perempuan yang berpengaruh. Serta mulai menyusun program yang menasar potensi pemuda seperti kelompok wisata susur hutan adat dan kelompok ibu-ibu dalam pengembangan sektor perekonomian kreatif seperti penyediaan kedai makanan, pertunjukan seni tradisional, hingga penjualan produk kain tenun Ulap Doyo sebagai buah tangan khas suku Dayak Benuaq.
 - b. Mengatasi kendala pendanaan, bisa mengupayakan iuran rutin sesuai kesepakatan dan kesanggupan bersama yang dikelola secara mandiri dan transparan oleh komunitas adat. Penggunaan dana tersebut kemudian diatur, dicatat, dan dilaporkan secara rutin dalam forum besar yang dilaksanakan oleh komunitas adat.
2. Pendekatan Indikator *Dialogis*
 - a. Sebaiknya pemerintah kampung dan komunitas adat saling menurunkan ego, kepentingan, dan bekerja sama dalam upaya pengelolaan hutan adat. Dimulai dengan mengupayakan pembentukan struktur organisasi sederhana komunitas adat kemudian dilaporkan ke pemerintah kampung untuk didata, dilanjutkan dengan diskusi. Pendekatan ke UPTD KPHP Damai bisa dijadikan opsi untuk menjalin koordinasi, kemudian peran

- pemerintah daerah sebaiknya ditingkatkan lagi dalam upaya sosialisasi dan fasilitasi pengajuan hutan adat kepada masyarakat di Kutai Barat.
- b. Komunitas adat sebaiknya memaksimalkan peran *opinion leader* dalam memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam program. Misalnya, memanfaatkan peran tokoh adat untuk melakukan pendekatan secara kultural kepada masyarakat yang masih mempertahankan tradisi leluhur dengan menekankan nilai-nilai kearifan lokal dan bersinergi dengan pemuka agama untuk menyasar masyarakat yang sudah meninggalkan kepercayaan terhadap leluhur dengan menekankan nilai-nilai keagamaan untuk mempertahankan wilayah adat.
3. Pendekatan Indikator *Poliponi*
 - a. Sebaiknya dilakukan komunikasi yang terfokus (*focused group discussion*) pada semua masyarakat Muara Tae, termasuk lembaga adat dan pemerintah kampung untuk menyamakan persepsi dan pemahaman. Dalam forum tersebut bisa digunakan oleh komunitas adat dengan memberdayakan anggota komunitas dalam grup kecil untuk meliterasi dan mengedukasi masyarakat terkait maksud, tujuan, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan adat.
 - b. Partisipasi akan terbentuk jika diiringi komunikasi dan interaksi yang berkelanjutan. Perlu juga diupayakan diskusi dan rapat rutin sesuai dengan waktu yang disepakati. Dapat dilakukan pembagian misalnya diskusi per minggu dengan kelompok pemuda, ibu-ibu, pemerintah kampung, dan dengan seluruh masyarakat dalam forum yang besar. Tujuannya untuk menampung aspirasi dan meliterasi yang berfokus pada permasalahan dan kebutuhan masing-masing pihak.
 4. Pendekatan Indikator *Karnaval*
 - a. Penggunaan media bisa diupayakan oleh komunitas adat dalam menyampaikan program kegiatan hingga konten edukasi secara berkala. Pemilihan media bisa disesuaikan dengan kondisi di Muara Tae yakni lebih banyak yang menggunakan Facebook dan WhatsApp agar lebih tepat sasaran. Bisa menggunakan poster, spanduk, dan papan informasi sebagai variasi media edukasi masyarakat di titik yang mudah ditemui: rumah kepala adat, warung, pasar, puskesmas, hingga kantor desa.
 - b. Pengelolaan media sosial sebaiknya melibatkan para pemuda di Muara Tae. Peran komunitas hanya sebatas mengawasi dan mengarahkan, sedangkan eksekusi bisa diserahkan kepada pemuda baik dalam menyusun rencana, pembuatan konten, hingga penyebaran informasi ke publik menggunakan saluran media yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- El, I. 2009. *Keragaan Kelembagaan Adat Agroforestri Dusun*. [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

- Ferdiani, N. 2016. *Partisipasi dan Perubahan Perilaku Anggota Kelompok Wanita Tani di Desa Cikarawang Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor*. [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Iswandono, E. 2016. *Integrasi Kearifan Lokal Masyarakat Suku Manggarai dalam Konservasi Tumbuhan dan Ekosistem Pegunungan Ruteng Nusa Tenggara Timur*. [Disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Lestari, T., Agussabti., & Alibasyah, M. R. 2014. *Partisipasi Masyarakat Adat dalam Konservasi Sumber Daya Hutan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar*. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Lahan*. Vol. 3 (2): 506-517.
- Muchtar, K. 2016. *Penerapan Komunikasi Partisipatif pada Pembangunan di Indonesia*. *Jurnal Makna*. Vol. 1 (1): 20-32.
- Nurdin, B. V., & Ng, K. S. F. 2013. *Local Knowledge of Lampung People in Tulang Bawang: An Ethnoecological and Ethnotechnological Study for Utilization and Conservation of Rivers*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*.
- Oktoyoki, H., Suharjito, D., & Saharuddin. 2016. *Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Kerinci oleh Kelembagaan Adat*. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, Vol. 3 No. 1, 2016: 39-51.
- Rahim, S. A. 2004. *Participatory Development Communication as a Dialogical Process* dalam White, S. A. 2004. *Participatory Communication Working for Change and Development*. New Delhi (IN): Sage Publication India Pvt Ltd.
- Satriani, I., Muljono, P., & Luminatang, R. W. E. 2011. *Komunikasi Partisipatif pada Program Pos Pemberdayaan Keluarga (Studi Kasus di RW 05 Kelurahan Situgede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor)*. *Jurnal Komunikasi Lingkungan*, Vol. 9 (2): 17-27.
- Senoaji, G. 2011. *Perilaku Masyarakat Baduy dalam mengelola lahan dan lingkungan di Banten Selatan*. *Jurnal Humaniora*. Vol 23 (1): 14-25.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung (ID): Alfabeta.
- Tanjung, N. S. 2016. *Komunikasi Partisipatif dalam Pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat*. [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Uphoff, N. T., Cohen, J. M., & Goldsmith, A. A. 1979. *Rural Development Committee: Feasibility and Application of Rural Development Participation: A State of the Art Paper*. New York (US): Cornell University.
- Yenrizal. 2017. *Lestarian Bumi dengan Komunikasi Lingkungan*. Yogyakarta (ID): Deepublish.